

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dadang Rahmad Hidayat dan Al Faqih, 2018, *“KPI Regulator Penyiaran Indonesia”*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Dedy N. Hidayat, 2000, *“Jurnal Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Judhariksawan, 2010, *“Hukum Penyiaran”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *“Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik”*, Nuansa, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997, *“Metode – metode Penelitian Masyarakat”*, Prenada Media, Jakarta.
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2013, *“Kedaulatan Frekuensi”*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2000, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Rosdakarya. Jakarta.
- Muhammad Mufid, 2005, *“Komunikasi dan Regulasi Penyiaran”*, Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *“Hukum Administrasi Negara”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, "*Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*", FH UII Press, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo. Soemitro, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

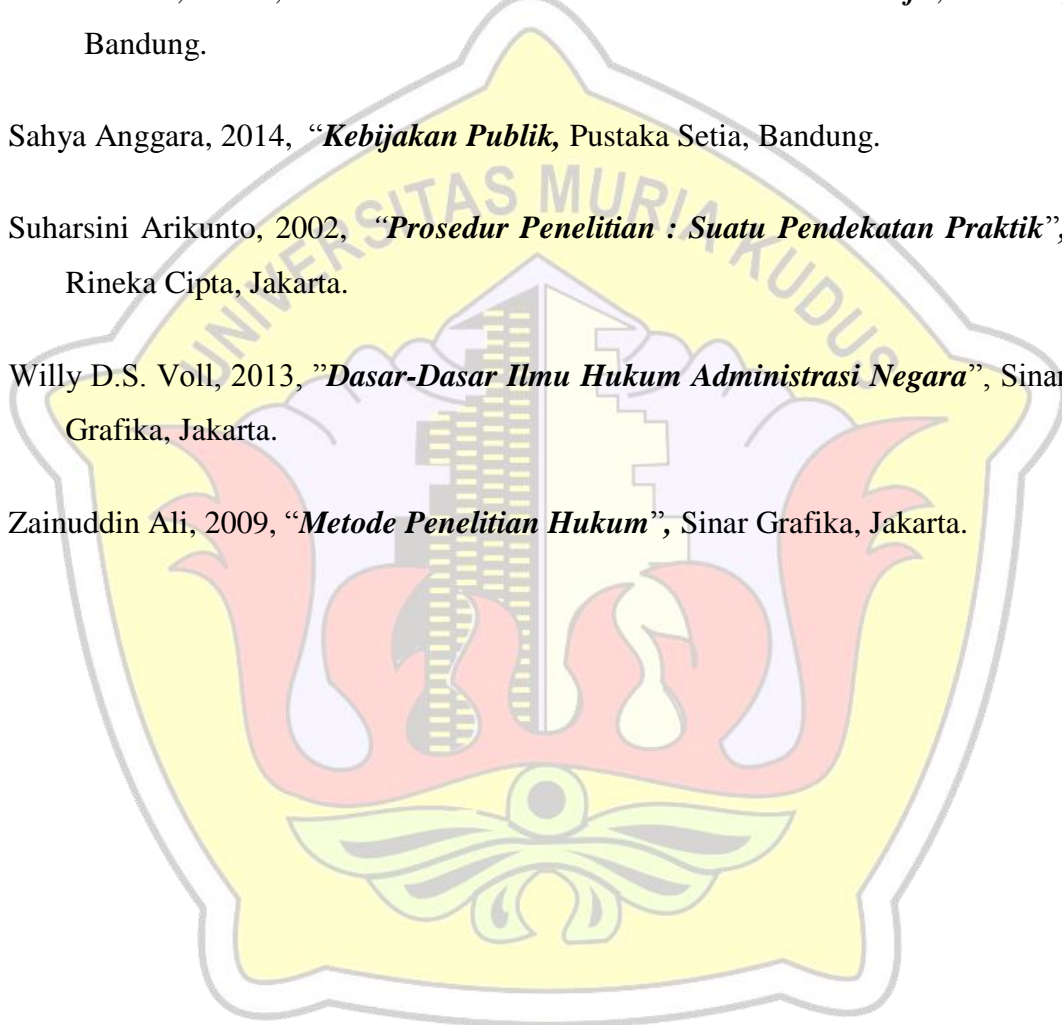
S. Nasution, 1996, "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*", Tarsito, Bandung.

Sahya Anggara, 2014, "*Kebijakan Publik*", Pustaka Setia, Bandung.

Suharsini Arikunto, 2002, "*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*", Rineka Cipta, Jakarta.

Willy D.S. Voll, 2013, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*", Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.



## **JURNAL**

Ashadi L.Diab, *Peranan Hukum Sebagai Sosial Control, Sosial Engineering dan Social Welfare*, Jurnal Al - 'Adl Vol. 7 No. 2 Juli 2014.

Irzha Friskanov, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 1 Januari 2016.

Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran dan Perizinan*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, No. 2 Vol. 15, Juli – Desember 2013.

## **REFERENSI ASING**

Nick Caistor, *New Broadcasting Law*, Index On Censorsip, Vol. 10 No. 4 1981

## **PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2930/SJ tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Surat Edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tentang Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi.